UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Interpreting Contrary to Pancasila Under Article 188 (1) of the Indonesian Criminal Code and Its Implication Towards Freedom of Expressions
Zhavia Lysandra Hakim, Devita Kartika Putri, S.H, LL.M
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Interpreting 'Contrary to Pancasila' Under Article 188 (1) of the Indonesian Criminal Code and Its Implications Towards the Freedom of Expression

Author:
Zhavia Lysandra Hakim[1] and Devita Kartika Putri[2]

ABSTRACT

This thesis examines the interpretation of the phrase "contrary to Pancasila" under Article 188 (1) of the KUHP and its implications towards the freedom of expression. The provision criminalises the dissemination or development of teachings deemed contrary to Pancasila; however, the absence of clear interpretive limits gives rise to concerns regarding legal certainty and the potential overreach of criminal law into the realm of ideological expression and political dissent.

Employing a normative juridical methodology, this research analyses Article 188 (1) of the KUHP through statutory, conceptual, historical, and comparative approaches, using grammatical, systematic, historical, and teleological methods of legal interpretation. To enrich and validate the normative analysis, the research is complemented by semi-structured interviews with legal scholars and practitioners. The thesis further examines whether the provision satisfies the requirements of legality, necessity, and proportionality applicable to restrictions on political and ideological expression.

This thesis finds that the indeterminate formulation of Article 188 (1) risks encompassing forms of expression that amount merely to ideological disagreement rather than concrete threats to the constitutional order. In the absence of sufficiently precise limiting principles, the provision creates the potential for arbitrary enforcement and excessive restriction of political expression. Accordingly, the thesis argues that Article 188 (1) of the KUHP should be interpreted restrictively so as to apply only to intentional acts of collective anti-constitutional mobilisation directed toward undermining or replacing the constitutional system. Failing such a restrictive interpretation, the continued inclusion of the provision within the KUHP warrants reconsideration. This research in any form does not contest ideological offence, but recommends a law that is restrictive.

Keywords: *Pancasila, legality, freedom of expression, ideology, Article 188 (1) KUHP, Indonesia*

---

[1] *Students of the Faculty of Law Universitas Gadjahmada (S1 IUP 2022)*
[2] *Lecturer at the Department of Criminal Law, Faculty of Law Universitas Gadjahmada*

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Interpreting Contrary to Pancasila Under Article 188 (1) of the Indonesian Criminal Code and Its Implication Towards Freedom of Expressions
Zhavia Lysandra Hakim, Devita Kartika Putri, S.H, LL.M
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Penafsiran Frasa 'Bertentangan dengan Pancasila' dalam Pasal 188 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia dan Implikasinya terhadap Kebebasan Berekspresi

Oleh:
Zhavia Lysandra Hakim[3] dan Devita Kartika Putri[4]

INTISARI

Penelitian ini mengkaji interpretasi frasa "bertentangan dengan Pancasila" dalam Pasal 188 ayat (1) KUHP serta implikasinya terhadap kebebasan berekspresi. Ketentuan tersebut mengkriminalisasi penyebaran atau pengembangan ajaran yang dianggap bertentangan dengan Pancasila; namun, ketiadaan batas interpretasi yang jelas menimbulkan persoalan terkait kepastian hukum dan potensi perluasan hukum pidana secara berlebihan ke dalam ranah ekspresi ideologis dan perbedaan pendapat politik.

Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini menerapkan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan historis, dan pendekatan perbandingan. Analisis dilakukan melalui metode penafsiran gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis terhadap frasa "bertentangan dengan Pancasila" dalam Pasal 188 ayat (1) KUHP, yang didukung dengan wawancara terhadap para ahli hukum sebagai data pendukung untuk memperkaya analisis normatif. Penelitian ini juga mengkaji apakah ketentuan tersebut memenuhi prinsip legalitas, kebutuhan, dan proporsionalitas yang berlaku terhadap pembatasan ekspresi politik dan ideologis.

Penelitian ini menemukan bahwa rumusan Pasal 188 ayat (1) yang bersifat tidak pasti berisiko mencakup bentuk-bentuk ekspresi yang pada dasarnya hanya merupakan perbedaan pandangan ideologis, dan bukan ancaman nyata terhadap tatanan konstitusional. Dalam ketiadaan prinsip pembatas yang cukup jelas, ketentuan tersebut membuka potensi penegakan hukum yang sewenang-wenang serta pembatasan yang berlebihan terhadap ekspresi politik. Oleh karena itu, penelitian ini berpendapat bahwa Pasal 188 ayat (1) KUHP seharusnya ditafsirkan secara restriktif sehingga hanya diterapkan terhadap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dalam bentuk mobilisasi kolektif yang bersifat anti-konstitusional dan ditujukan untuk merongrong atau menggantikan sistem ketatanegaraan. Apabila penafsiran restriktif demikian tidak diterapkan, maka keberlanjutan keberadaan ketentuan tersebut dalam KUHP patut untuk dipertimbangkan kembali. Penelitian ini dalam bentuk apa pun tidak menolak delik ideologi, tetapi merekomendasikan hukum yang bersifat restriktif.

Kata kunci: *Pancasila, asas legalitas, kebebasan berekspresi, Ideologi, Pasal 188 (1) KUHP, Indonesia*

---

[3] *Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjahmada (S1 IUP 2022)*
[4] *Dosen Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Gadjahmada*